

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK PARKIR
DI PERUMAHAN PONDOK SIDOKARE INDAH BLOK Q-20
SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh
Lifatul Nurjannah
NIM. C86215015



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Progam Studi Perbandingan Mazhab
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lifatul Nurjannah
Nim : C86215015
Fakultas/jurusan/prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik
Islam/Perbandingan Mazhab
Judul skripsi : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Parkir di
Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20
Sidoarjo.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Marct 2019

Saya yang menyatakan,



Lifatul Nurjannah

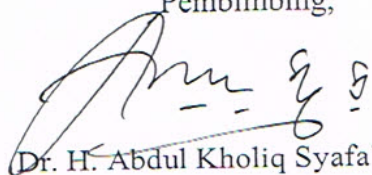
NIM. C86215015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lifatul Nurjannah NIM. C86215015 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Maret 2019

Pembimbing,



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.

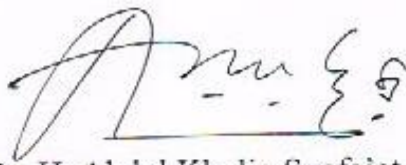
Nip.197106052008011026

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lifatul Nurjannah NIM.C86215015 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Rabu tanggal 13 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.

NIP. 197106052008011026

Penguji II



Drs. Suwito, M. Ag.

NIP. 195405251985031001

Penguji III



A Kemal Riza, S.Ag, MA.

NIP. 197507012005011008

Penguji IV



Siti Tatmainul Qulub, M.S.I.

NIP. 198912292015032007

Surabaya, 24 Mei 2019
Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lifatul Nurjannah
NIM : C86215015
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : lifa.fatul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

PERSETUJUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PENGUNAAN JALAN UMUM UNTUK PARKIR DI PERUMAHAN PONDOK
SIDOKARE INDAH BLOK Q-20 SIDOARJO

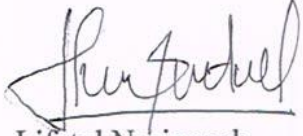
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juni 2019

Penulis


Lifatul Nurjannah

DAFTAR TRANSKRIPSI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	ṭ
2.	ب	B	ظ	ẓ
3.	ت	T	ع	‘
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	ḥ	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	هـ	H
13.	ش	Sh	ء	’
14.	ص	ṣ	ي	Y
15.	ض	d		

Sumber: kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations*
(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>fathah</i>	A
اِ	Kasrah	I
اُ	ḍammah	U

memberanikan diri untuk pindah dari desa menuju kota-kota besar demi menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka.²

Dengan banyaknya masyarakat desa yang pindah ke kota, jumlah penduduk kota mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk memunculkan hal-hal yang berdampak pada lapangan pekerjaan, belajar, maupun kurangnya interaksi sosial antar masyarakat. Kurangnya interaksi sosial antar masyarakat diakibatkan karena keterbatasan ruang kota. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah harus secara maksimal membuat rencana dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Perencanaan ruang dalam wilayah perkotaan hanya fokus dalam perencanaan penggunaan ruang atau lahan tingkat kota, tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan yang memiliki ciri-ciri perkotaan. Selain itu perencanaan penggunaan ruang atau lahan juga difokuskan di bidang perumahan atau pemukiman, transportasi, maupun prasarana perkotaan lainnya. ³

Dalam mengatur ruang atau lahan secara maksimal, dibutuhkan penataan ruang yang baik dan memadai agar dalam pembangunan tersebut tidak menimbulkan hal-hal negatif di kemudian hari. Dari banyaknya pembangunan fisik kota salah satu yang menjadi pusat perhatian yaitu

² Ibid.

³ Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 13.

dalam hal fasilitas transportasi. Karena pada era globalisasi ini transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia.⁴

Transportasi dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memindahkan atau mengangkut muatan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dari tempat asal ke tempat tujuan menggunakan sarana transportasi. Transportasi merupakan kegiatan yang melayani perjalanan dalam jarak dekat maupun jauh melalui daratan, lautan, maupun udara. Di Indonesia transportasi berkembang sangat cepat. Hal itu dapat dilihat dari sejarah transportasi di Indonesia. Pada zaman dahulu kuda atau binatang lainnya digunakan masyarakat sebagai sarana transportasi untuk mengangkut barang atau manusia, karena transportasi yang digunakan pada zaman dahulu adalah kuda maka jumlah barang yang diangkut sangat terbatas jumlahnya dan juga harus memerlukan waktu yang sangat lama untuk sampai ke tujuannya. Saat ini perkembangan sarana transportasi sudah sangat jauh berbeda dengan transportasi zaman dulu, setiap tahunnya jumlah sarana transportasi mengalami peningkatan dan memiliki daya angkut dalam jumlah besar dan waktu tempuh yang lebih singkat.⁵

Namun dengan mengikuti perkembangan transportasi dan perkembangan zaman kebutuhan manusia dalam hal transportasi semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan jumlah pemilik kendaraan dan jumlah

⁴ Zhanzah Ismaningtias, “Dampak Penataan Parkir Badan Jalan Terhadap Estetika Kota Di Kawasan Niaga Kota Surabaya”, *Journal Unair*, No. 3, Vol. 5 (September-Desember, 2017), 1.

⁵ Rahardjo Adisasmita, *Analisis Tata Ruang Pembangunan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 121.

Rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dan juga sistem lalu lintas yang belum sempurna mengakibatkan kemacetan yang terjadi dari waktu ke waktu, tidak hanya itu perilaku pengendara juga menjadi faktor pemicu semakin memperparah kemacetan. Penataan parkir atau tempat penyimpanan kendaraan yang semakin sempit dan kebutuhan akan lahan parkir semakin bertambah karena kendaraan pribadi semakin banyak. Ketidakseimbangan antara kendaraan dengan lahan parkir akan menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran dan berbagai macam permasalahan seperti penggunaan badan jalan untuk lahan parkir maupun permasalahan sosial lainnya termasuk kerukunan dalam bermasyarakat.⁷

Di antara dampak sosial yang sering dialami sebagian besar masyarakat akibat peningkatan jumlah kendaraan, tidak adanya lahan

⁷ Ibid.

Permasalahan tentang parkir ini terkadang tidak dihiraukan oleh sebagian besar kalangan masyarakat, kebanyakan tidak menyadari akan hal memarkir kendaraan pribadinya di depan rumah tetangga. Masyarakat menganggap bahwa masalah ini merupakan hal yang kecil tetapi ini menjadi problematika yang harus diperhatikan.

Dari uraian di atas maka diketahui bahwa masyarakat Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo banyak yang memarkir kendaraan pribadinya di jalan umum. Bagaimana hukum memarkir kendaraan mereka sebagaimana yang terjadi di Perumahan tersebut. Untuk itulah maka peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut dengan judul “
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo.”

[illegible]

2. Bagaimana penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian yang telah ada.⁹

Penelusuran awal sampai saat ini peneliti menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu penelitian:

1. Skripsi Hikmah Lailatus Tsuroyya tahun 2017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang berjudul “*Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimah di Masyarakat Perspektif Hukum Islam dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan-peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas*”. Titik perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian saya yaitu dalam hukum Islamnya antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama memperbolehkan menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi

⁹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

2. Skripsi Esti Nurokhmah 2017, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas Syariah yang berjudul “*Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Menurut Hukum Islam*”. Titik perbedaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu jika dalam penelitian terdahulu membahas tentang pemungutan uang parkir yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan, sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang hukum menggunakan jalan umum untuk parkir di perumahan yang didalam hukum Islamnya mengarah ke mengganggu tetangga dan dalam hukum positifnya diperbolehkannya menggunakan jalan umum untuk parkir dengan adanya marka jalan. Jalan umum yang dimaksud disini digolongkan ke dalam jalan desa.

3. Skripsi Try Bambang 2016, Universitas Hasanuddin Makasar fakultas Hukum yang berjudul “*Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum*”. Titik perbedaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu jika dalam penelitian terdahulu membahas tentang ketidaksesuaian penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum karna akibat dari kurangnya pemahaman petugas sehingga tidak tercapainya tujuan yang diharapkan. Sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang hukum menggunakan jalan umum untuk parkir di perumahan yang didalam hukum Islamnya mengarah ke mengganggu tetangga dan dalam hukum positifnya diperbolehkannya menggunakan jalan umum untuk parkir dengan adanya marka jalan. Jalan umum yang dimaksud disini digolongkan ke dalam jalan desa.
4. Skripsi Ira Fatunnisa 2015, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 (Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Wisata Kota Yogyakarta)*”. Titik perbedaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu jika dalam penelitian terdahulu membahas tentang penerapan pemungutan parkir yang tidak sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 yaitu adanya kenaikan penarikan parkir menjadi dua kali lipat dari yang

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek keilmuan (teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum Islam yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum untuk parkir yang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah dijelaskan mengenai tempat umum yang tidak boleh dipergunakan untuk parkir tanpa adanya marka jalan.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan bagi masyarakat untuk tidak mempergunakan jalan umum sebagai lahan parkir pribadi dan mematuhi setiap aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami judul skripsi yang akan penulis bahas, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi sebagai berikut:

- a. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

metode kualitatif, yakni tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap hukum penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo.

Agar penelitian ini berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang bisa dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu, yaitu metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data yang dikumpulkan

Data adalah yang berisi tentang jenis atau bentuk data apa yang diperoleh dalam penelitian.¹³ Data yang dikumpulkan merupakan data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tentang penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.¹⁴ Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah yang memberi informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan

¹³ Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 14.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

dengan observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁵ Maka narasumber yang dipilih untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua rukun warga Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo yaitu Bapak Sigit Yudo Utomo.
- 2) Warga masyarakat Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo Bapak Sunarso.
- 3) Warga masyarakat Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo Bapak Wahyu.
- 4) Warga masyarakat Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo Bapak Andreas.
- 5) Warga masyarakat Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo Bapak Ghofur.
- 6) Tokoh agama perumahan pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo Ustad Khoirul Anam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi,

¹⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 211.

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara induktif yang bertujuan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui aturan penggunaan jalan umum untuk parkir dan fungsi utama jalan dengan kenyataan penggunaan jalan diluar fungsi utamanya yaitu digunakan untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo. Apakah penggunaanya telah sesuai dengan aturan yang ada khususnya hukum Islam dan hukum Positif.

Bab Pertama, pendahuluan. Pada bab ini akan dikemukakan hal yang sifatnya sebagai pengantar untuk memahami isi skripsi. Bab ini terdiri dari

latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika penelitian

Bab Kedua, dalam bab ini membahas tentang landasan teori mengenai penggunaan jalan umum untuk parkir menurut hukum Islam (Fikih Bertetangga) dan hukum positif (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Landasan teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut dijadikan sebagai analisis untuk menjelaskan data yang telah dikumpulkan.

Bab Ketiga, dalam bab ini membahas data penelitian mengenai penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo. Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian lapangan yang berisikan gambaran umum tentang lokasi penelitian, penggunaan jalan umum untuk parkir dan sebab akibat yang ditimbulkan dari penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo.

Bab Keempat, bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang analisis penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo ditinjau dengan hukum Islam dan hukum positif.

Bab kelima, penutup. Dalam bab ini merupakan bagian penutup yang berisi tentang hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian dan

serta semua perbuatan yang mengakibatkan keburukan atau menimbulkan gangguan semua itu termasuk hak jalan.⁶

d. Menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram

Seyogianya apabila seseorang duduk di pinggir jalan atau berjalan di tempat tersebut menundukkan pandangannya dari apa yang diharamkan. Menundukkan pandangan merupakan hak jalan sebagaimana yang disebutkan didalam hadist:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ

Artinya:

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:”Janganlah kalian duduk duduk dipinggir jalan”.⁷

e. *‘Amr ma’rūf nahī munkar* (Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran)

‘*Amr ma’rūf* dan *Nahī munkar* merupakan misi dari semua Nabi yang diutus Allah Swt. ‘*Amr ma’rūf* dan *Nahī munkar* juga merupakan puncak terbesar agama Islam. Jika ‘*Amr ma’rūf* dan *Nahī munkar* dihilangkan maka ilmu tentangnya akan dibiarkan.⁸

Di jalan kita juga wajib berbuat *‘Amr ma’rūf* dan *Nahī munkar* seperti tidak berbuat sesuatu yang menyebabkan kemungkaran.

‘Amr ma’rūf dan *Nahī munkar* juga termasuk bagian dari hak jalan oleh karena itu setiap muslim wajib melakukannya. Seorang muslim

⁶ Ibid., 159.

⁷ Hadis Bukhari N0.2465. Kitab Shahih Bukhari, Bab Perbuatan-Perbuatan Zalim dan Merampok, Kitab Hadist Digital 9 Imam Lidwa Pusaka Offline.

⁸ Ahmad Farid, *Lautan Kebahagiaaan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010), 324.

integritas seseorang, karena itu sangat tepat pada era yang ditandai dengan pesatnya informasi serta tawaran nilai-nilai yang berpegang teguh pada kaidah mempertahankan nilai yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik.¹³

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seseorang melarang tetangganya untuk menyandarkan kayunya di dinding rumahnya". Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: "Jangan sampai aku lihat kalian menolak ketentuan hukum ini. Demi Allah, kalau sampai terjadi, akan aku lempar kayu-kayu itu menimpa samping kalian"

a. Pengertian *Qiyās*

Qiyās menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Menurut istilah ushul fiqh *qiyās* berarti menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *'Ilah* antara keduanya.¹⁷

b. Rukun *Qiyās*

Dari pengertian *qiyās* yang telah disebutkan di atas ada empat unsur yang menentukan adanya *qiyās* yang dalam istilah ushul fiqh disebut rukun yaitu:

- 1) *‘Aslu*, adalah suatu kejadian yang sudah ada dalam nash hukum.

‘*Aṣlu* ini disebut juga *mushabbah bih* (sesuatu yang disamakan dengan sesuatu yang lain) dan disebut juga *maqis ‘Alaih* (sesuatu yang di^{qiyā}skan kepadanya suatu yang lainnya). Seperti minuman keras yang bernama *khamar* yang telah ditetapkan hukum haramnya dalam Alquran.

- 2) *Furu'*, adalah sesuatu hal yang belum ada pada nash hukum yang akan ditetapkan hukumnya melalui *qiyās*. *Furu'* ini juga disebut

¹⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005), 130.

- 3) *Hukum*, adalah hukum yang berlaku pada *‘aşlu* yang telah ditetapkan dalam nash hukum dan akan ditetapkan pula pada *furu’* melalui *qiyās*. Seperti dalam hal ini adalah hukum haram.
- 4) *‘Ilah Hukum*, adalah sifat yang jelas yang terdapat pada *‘aşlu*, dan terdapat juga dalam *furu’* maka hukumnya disamakan dengan *‘aşlu*. Misalnya dalam hal ini adalah sifat memabukkan.¹⁸

Pembagian *qiyās* dari segi kekuatan penetapan hukum pada *furu'* bila dibandingkan dengan kekuatan pada *‘aṣlu*, *qiyās* dibagi menjadi tiga yaitu:

- ¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 52-53.

3) *Qiyās Adnan*, adalah *qiyās* yang berlakunya hukum pada *furu'* kurang kuat dibandingkan dengan berlakunya pada *'aṣlu*, karena keadaan *'Ilah*nya lebih rendah dari yang terdapat pada *'aṣlu*. Seperti keharaman pembunuhan dengan benda berat di*qiyā*skan dengan pembunuhan dengan benda tajam yang ditetapkan nash Alquran. Walaupun keduanya sama hukumnya haram namun keharaman pada *furu'* keadaanya kurang kuat dibandingkan dengan hukum yang terdapat pada *'aṣlu*. Walaupun *qiyās* ini sudah sah dan memenuhi syarat namun kedudukannya lemah.¹⁹

Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.²⁰

¹⁹ Ibid., 55-56.

[illegible]

Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga dijelaskan tentang masalah perparkiran. Dalam pasal 43 bagian kelima tentang fasilitas parkir dijelaskan sebagai berikut:²²

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir diluar milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. Usaha khusus perparkiran atau
 - b. Penunjang usaha pokok
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.

Latar belakang dari tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw adalah untuk penataan hal-ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawiyahnya. Maka dalam penataan tersebut dapat dilihat dengan adanya empat garis besar yaitu:

- ²¹ Alfred Rodriques Januar Nabal, “Evaluasi Kebutuhan Lahan Parkir Pada Area Parkiran Kampus Fisip Universitas Atma Jaya Yogyakarta”, *Jurnal Teknik Sipil*, No. 1, Vol. 13 (Oktober, 2014), 33.
- ²² Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Empat garis besar yang sudah disebutkan, itu merupakan penjelasan nyata bentuk dari rahmat kasih sayang Allah Swt yang mencakup semuanya. Empat garis besar tersebut didalamnya masing-masing bidang menata pokok dari kehidupan yang aman, damai dan bahagia.²³

Seorang muslim yang sangat memahami apa yang diajarkan oleh agamanya maka ia akan menjadi seseorang yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agamanya, termasuk dalam menjalin hubungan dengan sesamanya terutama hubungan dengan tetangganya, menghormati, saling tolong menolong dan berbuat baik terhadap mereka dengan tidak menyakiti ataupun menggangukannya.²⁴

Dalam kehidupan bertetangga hak seorang muslim dengan muslim lainnya salah satunya yaitu menjaga tangan dan lisannya dengan tidak mengambil haknya, tidak mengganggu atau menyakiti. Seorang muslim diharamkan untuk melakukan hal yang membahayakan dan menyakiti

²⁴ Muhammad Ali al-Hasyimi, *Muslim Ideal Pribadi Dalam al-Quran dan as-Sunnah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 171.

Definisi tetangga juga tidak hanya terbatas pada orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita tetapi tetangga juga mencakup semua orang yang sering berada atau berdekatan dengan kehidupan sehari-hari kita, karena adanya kesamaan kepentingan dan kegiatan, seperti teman kerja, teman sekolah atau teman organisasi ataupun yang lainnya.³⁰

- Tetangga dekat
- Tetangga jauh

Menurut Imam Asy-syaukani dalam kitab fathul qadir menyatakan bahwa sebagian ulama menafsirkan tetangga dekat dengan tetangga yang memiliki kedekatan dari sisi nasab. Sedangkan tetangga jauh adalah kebalikannya yakni tetangga yang tidak memiliki hubungan nasab". Menurut Ali bin Abi Thalhah dari sahabat Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah tetangga yang diantara anda dan dirinya terdapat hubungan kekerabatan dan kedekatan. Sedangkan yang dimaksud dengan tetangga jauh adalah tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan dan kedekatan. Pendapat semacam ini juga dipegang oleh ikrimah, Mujahid, Maimun bin Mahraan. Dan Adh-Dhahak, juga menurut Zaid bin Aslam, Muqotil bin Hayan dan Qatadah.³¹

³¹Abdurrahman Al-Baghdadi dan Syamsudin Ramadhan An-Nawi, *Fikih Bertetangga*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2005), 11-12.

Dari klasifikasi tetangga dekat dan tetangga jauh didalamnya terdapat dua hak:

Hak Ta'ālī adalah hak dimana seseorang yang memiliki hak tersebut mempunyai hak untuk tinggal di atas orang yang tinggal di lantai bawa, hak ini berlaku untuk orang yang berada di lantai atas, Hak tersebut tidak akan hilang meskipun 'aqar secara keseluruhan hancur maupun hanya sebagian saja yang hancur. Meskipun pemiliki *hak ta'ālī* berhak untuk tinggal di atas harus tetap menjaga agar tidak membahayakan seseorang yang tinggal di bawah. Dan ketika terjadi suatu hal yang mengakibatkan bagian bawahnya hancur, maka pemilik bangunan mempunyai kewajiban untuk membangunnya kembali.³³

b. *Hak jiwar janibī* yang dimiliki oleh setiap tetangga terhadap tetangganya yang lain.

³² Ummu Salamah, *Jadikan Rumahmu Seperti Surqa*, (Yogyakarta: Diva Pres, 2015), 161.

Dalam hal diatas Abu Hanifah berpendapat, tindakan seperti itu tidak diperbolehkan kecuali tetangganya memberikan ijin, karena suatu hal yang dimana hak pemilik berhubungan dengan hak kepemilikan orang lain harus berhati-hati, karena kepemilikannya tidak secara menyuluruh murni. Dalam hal tersebut maka ia tidak boleh melakukan suatu perbuatan apapun kecuali ia meyakini bahwa perbuatan itu tidak akan menimbulkan bahaya untuk orang lain.

Sedangkan menurut pendapat yang difatwakan oleh ka
Hanafiyyah, hal tersebut pada dasarnya diperbolehkan karena
yang berada di atas melakukan suatu hal yang masih berada dal
miliknya dan seorang pemilik mempunyai kebebasan untuk berb
saja dalam daerah kepemilikannya selama ia meyakini bahwa ap
dilakukannya tidak menimbulkan bahaya untuk orang lain. Ja
penjelasan di atas maka antara hukum *jiwār janibī* dan *jiwār*

³⁴ Ibid.409-410.

adalah sama, yaitu diperbolehkan melakukan atau berbuat apa saja pada daerah kepemilikannya selama perbuatan yang ia lakukan tidak menimbulkan bahaya yang nyata terhadap tetangga. Jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya maka pihak yang menimbulkannya harus mengganti sesuatu yang rusak akibat dari perbuatannya. Baik bahaya ataupun keburukan tersebut itu bersifat langsung ataupun dikarenakan sebab yang mengakibatkan bahaya. Inilah pendapat kalangan Malikiyyah dan juga pendapat mazhab yang lain.³⁵

Dalam kaitannya dengan kehidupan bertetangga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh seorang muslim yaitu dengan menghormati, menghargai dan memuliakan tetangga.³⁶ Perbuatan baik yang kita lakukan terhadap tetangga merupakan suatu akhlak atau perbuatan yang baik bahkan kelak ketika berada di akhirat tetangga yang kaya akan terikat dengan tetangganya yang miskin karena tidak memberikan perlakuan baik terhadapnya.³⁷

Dalam sebuah hadis disebutkan, bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُتَّقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتُ

³⁵ Ibid.

³⁶ Fathiy Syamsuddin, *Fiqh Bertetangga* (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2018), 13.

³⁷ Faishal, *Oase Kehidupan*, (Cikarang: Duha Khazanah, 2007), 11.

Seorang muslim juga dilarang menghina pemberian dari tetangganya meskipun pemberian tersebut merupakan hal yang sangat kecil bahkan tidak bernilai seperti secuil kaki domba, tetapi itu adalah hal yang lebih baik daripada tidak tidak memberi sama sekali.⁴⁰

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat atom pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Ali al-Hasyimi, *Muslim Ideal...*, 179.

[illegible]

Allah. Baik orang yang berbuat baiknya itu orang beriman ataupun orang *kafara*. Tegasnya lagi amal kebaikan orang *kafara* dihargai, meskipun dia dengan demikian tidak terlepas daripada hukuman kekafirannya.⁴²

- b. Tidak melarang tetangganya yang hendak menancapkan kayu di tembok tetangganya.

Tidak melarang tetangganya yang hendak menancapkan kayu di dinding rumahnya merupakan salah satu bentuk dari cara memuliakan tetangga. Dalam sebuah hadits diriwayatkan, bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرَرَ حَشْبَهُ فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ

Artinya:

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seseorang melarang tetangganya untuk menyandarkan kayunya di dinding rumahnya". Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: "Jangan sampai aku lihat kalian menolak ketentuan hukum ini. Demi Allah, kalau sampai terjadi, akan aku lempar kayu-kayu itu menimpa samping kalian".⁴³

Dalam permasalahan ini menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Imam Malik dan Abu Hanifah menyatakan, bahwa dalam hal larangan tidak boleh melarang tetangganya yang ingin menancapkan kayu di dinding rumahnya

⁴² Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1982), 239-241.

⁴³ Hadis Bukhari N0.2283, Kitab Shahih Bukhari, Bab Perbuatan-perbuatan Zalim dan Merampok, Kitab Hadist Digital 9 Imam Lidwa Pusaka Offline.

Secara terperinci tidak berlaku zalim terhadap tetangga dapat dilakukan dengan cara:

- Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw:

Artinya:

⁴⁵ Ibid., 46-50.

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1,05 Km
- Jarak dari Ibukota Kabupaten : 2 Km
- Jarak dari Ibukota Provinsi : 23Km
- Jarak dari Ibukota Negara : 1000 Km

2. Letak Demografi Kelurahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo

² Profil Kelurahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo Tahun 2013.

- e. Pertukangan sebanyak : 263 orang
- f. Pensiunan sebanyak : 268 orang
- g. Jasa sebanyak : 935 orang

Masyarakat di Kelurahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo mayoritas beragama Islam dengan total 14.623 orang, agama Kristen sebanyak 1.126 orang, agama Khatolik sebesar 253 orang, agama Hindu sebesar 135 orang dan agama Budha sebesar 70 orang yang berkewarganegaraan Indonesia.

4. Sarana sosial

Sarana sosial di Kelurahan Pondok Sidokare Indah terbagi dalam tiga sarana sosial, yang pertama jumlah sarana pendidikan kelompok bermain terdiri dari 5 unit, Taman Kanak-Kanak terdiri dari 10 unit, Sekolah Dasar terdiri dari 5 unit dan Madrasah terdiri dari 1 unit.

Selain sarana Pendidikan di Kelurahan Pondok Sidokare Indah ini juga terdapat sarana peribadatan yang terdiri dari Masjid berjumlah 11 unit dan musholla berjumlah 19 unit.

Kemudian terdapat juga sarana kesehatan yang terdiri atas, Rumah sakit umum swasta terdiri dari 1 unit, Rumah sakit bersalin terdiri dari 1 unit, Poliklinik terdiri dari 9 unit dan Apotek terdiri dari 6 unit.⁵

⁵ Profil Kelurahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo Tahun 2013.

Jadi pada intinya memarkir kendaraan pribadi di depan rumah tetangganya menjadi fenomena yang sudah biasa dalam masyarakat, khususnya pada masyarakat Kelurahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo. Karena hampir semua warga masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi memarkir kendaraan nya secara sembarangan baik itu parkir di pinggir jalan ataupun parkir di depan rumah tetangganya.

Segala peristiwa yang terjadi tanpa adanya sesuatu yang menyebabkan peristiwa itu ada itu seperti membenarkan pendapat bahwa suatu akibat terjadi tanpa adanya sebab. Tetapi dalam kenyataanya keberadaan akibat harus disebabkan oleh sebuah sebab.⁸

Begitu pula dengan permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum untuk parkir di Kelurahan Pondok Sidokare Indah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Adanya sebab permasalahan tersebut terjadi pasti akan menimbulkan akibat pula.

[illegible]

Sesuai pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Andreas: “Perumahan sini sudah lama, jadi desainnya dulu tidak ada lahan untuk parkir mobil jadi bangunannya itu lebih ke depan lain dengan bangunan sekarang yang lebih mundur kira-kira lima meter itu depannya bisa buat parkir, mungkin itu kendalanya.”¹⁰

“warga rumah-rumah tipe 36 27 memang di desain untuk kalangan menengah kebawah, intinya itu untuk mempunyai mobil sangat sulit tetapi ternyata dengan kemajuan zaman perkembangan zaman mobil itu bukan harga yang tidak bisa dijangkau apalagi dengan menawarkan kredit. jadi orang banyak yang mempunyai mobil, akhirnya perumahan-perumahan yang tipe 27 tipe 36 banyak yang mempunyai mobil semua jadi padat jalannya. Tapi kalok mungkin perumahannya tipe 45 ya memang di desain ada garasinya tapi kalok 27-36 itu gak ada.”¹¹

¹¹Sigit Yudo Utomo, (Ketua RT), *Wawanvara*, Tanggal 27 Desember 2018.

Dari penjelasan Bapak Andreas di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya warga juga tidak menginginkan adanya parkir sembarangan tersebut, tetapi dengan kondisi lahan yang sempit mengharuskan warga untuk memarkir kendaraannya di pinggir-pinggir jalan atau di depan rumah tetangganya meskipun lingkungan akhirnya terlihat tidak indah dan kurang nyaman.

Tidak hanya mengganggu keindahan lingkungan saja tetapi dari permasalahan ini mengakibatkan adanya konflik-konflik yang terjadi antar tetangga. Seperti memarkir mobil di depan rumah tetangganya dengan tidak ijin terlebih dahulu sehingga mengganggu aktivitas tetangganya.

Sesuai dengan pendapat yang disampaikan Bapak Sunarso: “Disini gak ada warga yang parkir sembarang tapi tidak ijin terlebih dahulu walaupun

[illegible]

Dari harapan dan saran yang sudah disampaikan oleh warga masyarakat Perumahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo dapat diambil kesimpulan bahwa warga menginginkan adanya lahan kosong yang disediakan untuk dijadikan parkir umum khusus warga masyarakat Perumahan Pondok Sidokare Indah. Agar masalah parkir sembarangan ini bisa diselesaikan dengan adanya solusi. Dan agar lingkungan di Perumahan Pondok Sidokare Indah terlihat nyaman dan tidak terkesan kumuh dan berserakan.

[illegible]

A. Alasan Penggunaan Jalan Umum Untuk Parkir Di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo

Hampir semua warga memiliki mobil tetapi mereka tidak memikirkan untuk tempat memarkirnya, bahkan realitanya warga tidak hanya memanfaatkan jalan umum untuk memarkir kendaraannya banyak warga yang menggunakan jalan yang berada di depan pagar rumah tetangganya untuk dijadikan tempat memarkir kendaraannya. Dari permasalahan inilah yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan dalam hubungan

bertetangga. Terganggunya sang pemilik rumah untuk memasukkan atau mengeluarkan kendaraannya karena adanya mobil yang terparkir di depan rumahnya menjadi salah satu sebab adanya konflik dari masalah ini. Penyebab lain dari munculnya konflik yang terjadi karena masalah parkir ini yaitu tidak adanya izin kepada sang pemilik rumah ketika memarkir kendaraan di depan rumahnya, meskipun konflik tersebut bisa diatasi dengan cara pribadi tetapi masalah ini harus tetap diselesaikan agar tidak ada konflik-konflik baru yang bermunculan. Karena seharusnya kita sebagai manusia dan sebagai makhluk sosial harus bisa bersosialisasi dengan baik terhadap sesama.

Islam mengajarkan untuk selalu berbuat baik terhadap sesama, terutama kepada orang yang memiliki hubungan dekat dengan kita diantaranya tetangga. Banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama di perumahan tentang hubungan bertetangga. Hidup bertetangga sangatlah penting karena manusia diciptakan untuk saling bersosialisasi. Hidup bertetangga seharusnya saling menghormati, saling tolong menolong dan saling berbuat baik satu sama lain tanpa ada yang tersakiti baik dari perbuatan maupun perkataan. Tetapi kenyataannya di era milenial ini banyak masyarakat yang lebih memilih untuk hidup secara individu, tanpa membutuhkan bantuan dari tetangga. Dari keindividuan inilah hubungan bertetangga yang seharusnya diterapkan dengan baik sesuai ajaran Nabi Muhammad saw agar kehidupan bertetangga bisa nyaman dan damai justru menimbulkan banyak permasalahan.

B. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penggunaan Jalan Umum untuk Parkir

1) Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan Islam pada dasarnya semua yang ada di langit dan bumi hakikatnya adalah milik Allah Swt. Allah memberikan kuasanya kepada manusia untuk menjaga dan memanfaatkannya sesuai dengan hukumnya. Maka dari itu semua yang ada di bumi bisa dimanfaatkan oleh semua makhluknya akan tetapi setiap manusia sudah mempunyai hak kepemilikan tersendiri.

Setiap manusia sudah memiliki hak atas tanah yang dimilikinya meskipun hakikatnya itu adalah tanah milik Allah. Karena dalam hukum Indonesia juga sudah diatur hak atas kepemilikan tanah, jadi setiap manusia sudah mempunyai hak atas tanahnya masing-masing. Sebagai contoh permasalahan yang ada di Perumahan Pondok Sidokare Indah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Fenomena yang terjadi di sana adalah kebiasaan warga menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi yaitu dalam hal memarkir mobil pribadi. Seharusnya itu merupakan jalan yang diperuntukkan atau digunakan untuk berlalu lintas di perumahan tersebut tetapi tidak digunakan sesuai fungsinya.

Islam memperbolehkan menggunakan jalan umum untuk parkir. Tetapi dalam hal menggunakan jalan umum atau jalan di depan rumah tetangganya untuk parkir tidak sampai mengganggu kenyamanan orang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعُ جَارُ جَارِهِ أَنْ يَعْرِزَ حَشْبَهُ فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتِفَيْكُمْ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seseorang melarang tetangganya untuk menyandarkan kayunya di dinding rumahnya". Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: "Jangan sampai aku lihat kalian menolak ketentuan hukum ini. Demi Allah, kalau sampai terjadi, akan aku lempar kayu-kayu itu menimpa samping kalian".¹

Berdasarkan dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa larangan menancapkan kayu tersebut dapat disamakan dengan parkir. Karena telah memenuhi rukun qiyas:

Bolehnya menancapkan kayu di tembok rumah tetangga yang ditetapkan dalam hadist di atas.

[illegible]

2. *Furu'*

Parkir mobil di depan rumah tetangga yang hukumnya belum diketahui dalam nash dan akan ditetapkan hukumnya melalui *qiyās*.

3. *Hukum*

Hukum menancapkan kayu di tembok rumah tetangga dalam
hadist tersebut adalah boleh.

4. 'Ilah Hukum

Berdasarkan kedua permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa keduanya sama-sama memanfaatkan lahan tetangga untuk kepentingan pribadi.

Jadi parkir mobil di depan rumah tetangga diperbolehkan karena hal tersebut dapat di*qiyā*skan dengan menancapkan kayu di depan rumah tetangganya. Dari permasalahan tersebut digolongkan dalam *qiyās adnan*. *qiyās adnan* merupakan *qiyās* yang berlakunya hukum pada *furu'* kurang kuat dibandingkan dengan berlakunya hukum pada *'Aşlu*. Hal tersebut dapat dilihat dari kapasitas besar dan kecilnya objek permasalahannya, yang mana dihukum ashal obyeknya adalah kayu yang kapasitasnya lebih kecil daripada mobil.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tetapi sesuai dengan pendapat Imam Syafii bahwa hukum dari tidak boleh melarang

tetangganya untuk menancapkan kayu di temboknya adalah wajib.² Sesuai dengan yang diucapkan Rasulullah saw. Tetapi jika kayu tersebut membahayakan maka hukumnya wajib untuk mencabutnya.

Pendapat ini sesuai jika diterapkan dalam hal memarkir mobil di depan rumah tetangganya, jika sekedar memarkir maka kita sebagai tetangga harus dengan ikhlas memperbolehkan untuk memarkir tetapi jika parkir tersebut menimbulkan bahaya atau kerusakan bahkan ketidaknyamanan kita maka boleh menolak untuk tidak memperbolehkan memarkir mobil di depan rumah.

2) Perspektif Hukum Positif

Dalam perkembangannya jalan dibangun sedemikian mungkin dengan fungsi tersendiri untuk lebih memudahkan dalam berlalu lintas dan beraktivitas. Di Indonesia telah diatur peraturan dalam penggunaan jalan agar masyarakat mengetahui setiap fungsi dari berbagai pengelompokan jalan yang ada.

Sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang jalan Bab III Bagian ke dua pasal 9 Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

² Wajib adalah sesuatu yang diperintahkan (diharuskan) oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh orang mukalaf, dan apabila dilaksanakan akan mendapat pahala dari Allah, sebaliknya apabila tidak dilaksanakan diancam dengan dosa. Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 43.

- jalan Nasional
- jalan Provinsi;
- Jalan Kabupaten;
- Jalan Kota; dan
- Jalan Desa³

Peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur masyarakat agar tertib dan patuh salah satunya untuk mengatur dalam hal lalu lintas. Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimana undang-undang ini dibuat untuk mengatur segala permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan.

Di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 mengatur tentang masalah perparkiran. Dimana di dalam ayat 43 menjelaskan tentang fasilitas parkir, ayat tersebut berbunyi:

- 1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- 2) Penyelenggaraan fasilitas parkir diluar milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. Usaha khusus perparkiran atau
 - b. Penunjang usaha pokok
- 3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.⁴

Jika melihat pada pasal 43 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka Memarkir kendaraan

³ Undang-undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan.

⁴ Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pribadi dengan memanfaatkan pinggir jalan termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Parkir di dalam ruang milik jalan hanya bisa dilakukan di tempat tertentu bukan di semua tempat ataupun sepanjang jalan dan harus mendapatkan ijin yaitu dalam bentuk rambu dan/atau marka dari pemerintah daerah atau instansi yang berwenang.

Pada dasarnya seseorang bisa menggunakan ruang milik jalan atau jalan di depan rumah untuk memarkir kendaraan pribadinya. Karena di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, jalan yang boleh digunakan untuk memarkir kendaraan pribadi adalah jalan desa, jalan kabupaten atau kota.

Jadi Intinya dalam masalah penggunaan jalan umum atau jalan depan rumah tetangga untuk memarkir kendaraan pribadi yang terjadi di masyarakat Perumahan Pondok Sidokare Indah ini diperbolehkan karena jalan perumahan termasuk dari kategori jalan desa. Tetapi meskipun diperbolehkannya menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi di dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa harus ada rambu lalu lintas atau marka jalan.

Dalam analisis di atas dapat diketahui bahwa di Perumahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo terdapat unsur-unsur penggunaan jalan umum yang tidak sesuai dengan fungsinya yaitu dengan

menggunakan jalan umum untuk memarkir kendaraannya. Sebetulnya masyarakat boleh menggunakan jalan umum untuk parkir karena jalan yang digunakan termasuk dari kelompok jalan desa. Tetapi meskipun demikian masyarakat tetap harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sebelum menggunakan jalan umum tersebut untuk parkir. Agar tidak terjadi bahaya yang ditimbulkan dari parkir tersebut. Karena jika mendapatkan izin dari pihak yang berwenang maka jalan tersebut ditandai dengan rambu lalu lintas atau marka jalan untuk pemberitahuan bahwa di jalan tersebut sudah diperbolehkan atau sudah mendapat izin untuk dijadikan tempat memarkir kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Habib. *Menajadi Manusia Paling Beruntung*. Yogyakarta: Qudsi Media, 2015.
- Adisasmita, Rhardjo. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- , *Analisis Tata Ruang Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman dan Syamsudin. *Fikih Bertetangga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Ali al-Hasyimi, Muhammad. *Muslim Ideal Pribadi Dalam al-Quran dan as-Sunnah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Qordhawi, Yusuf. *Jalan menuju ma'rifat islam*. Jakarta: Restu Ilahi, 2006.
- An-Nu'aim, Muhammad bin Ibrahim. *Rahasia Panjang umur*. Surabaya: Cv. Fitrah Mandiri Sejahtera, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- As-Said, Abu Anas Shalahuddin Mahmud. *Membuka Pintu Rahmat*. Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009.
- Aziz, Abdul. *Ensiklopedi Adab Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Imam Syafi'i, 2007.
- AZ-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Waadillatuhu jilid 4*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.
- Bukhari. *Kitab Shahih Bukhari, Perbuatan-perbuatan Zalim dan Merampok*, Kitab Hadist Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.
- Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*. Surabaya: Karya Agung, 2006.
- Ensiklopedia Hukum Islam, "Fiqh Seputar Tetangga dan Jalan", dalam <https://Yufidia.com>, diakses pada 10 November 2018.
- Faishal, *Oase Kehidupan*. Cikarang: Duha Khazanah, 2007.
- Farid, Ahmad. *Lautan ke Bahagiaan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010.

- [illegible]

